

Judul : Komisi I dukung aksi peremajaan Alutsista
Tanggal : Minggu, 23 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rencana Penjualan KRI

Komisi I Dukung Aksi Peremajaan Alutsista

ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mendukung rencana Pemerintah menjual Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara yang merupakan kapal latih TNI Angkatan Laut (AL). Pelepasan aset itu bisa jadi bagian dari peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI.

Menurutnya, peremajaan alutsista merupakan kunci agar kekuatan pertahanan Indonesia tetap relevan. Alutsista perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi global dan kebutuhan strategis nasional. Jika biaya perawatan tidak sebanding dengan kemampuan maupun manfaat operasional, alutsista berumur tua memang tidak semestinya dipertahankan.

"Selain itu, penggunaan armada uzur berpotensi besar menimbulkan risiko keselamatan jiwa bagi para prajurit TNI saat menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara," katanya, Jumat (21/8/2026).

Selanjutnya, kata Oleh, proses penjualan atau penghapusan alutsista dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu memastikan

hadirnya unit pengganti yang lebih modern dengan kemampuan operasional unggul. Hasil pelepasan alutsista lama itu juga mesti mendukung program peremajaan tanpa mengosongkan armada siaga.

Pemerintah diharapkan konsisten menjalankan modernisasi pertahanan secara bertahap dan terukur. Langkah itu mencakup penguatan armada TNI AL menggunakan kapal perang berteknologi modern, aman, serta sesuai kebutuhan wilayah kepulauan. "Prajurit mesti dibekali alutsista layak demi menjaga kedaulatan laut nasional secara optimal," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menambahkan, pihaknya belum mengambil sikap terkait usulan Pemerintah menjual kapal tersebut. Pembahasan khusus akan dilakukan untuk mengkaji alasan, kondisi kapal, serta berbagai pertimbangan sebelum menentukan keputusan legislatif. Penjelasan menyeluruh dari Pemerintah jadi poin penting dalam proses ini.

Dia bilang, pembahasan mengenai kapal itu juga mencakup nilai aset serta kepastian fungsinya bagi kepentingan pertah-



FOTO: WEB PKB

Oleh Soleh

anan negara. Setelah seluruh data diperoleh, Komisi I DPR akan menggelar rapat bersama Pemerintah sesuai mekanisme. "Keputusan akhir akan diambil berlandaskan hasil evaluasi objektif secara menyeluruh dan transparan," jelasnya.

Selain aspek teknis pertahanan, kata Dave, dalam proses ini nilai sejarah KRI Ki Hajar Dewantara juga perlu dipertimbangkan. Apalagi kapal itu mencatat rekam jejak panjang dalam pembentukan prajurit TNI AL. Jika memang tak lagi digunakan, pemindahtanganan aset mesti berjalan tertib, transparan, serta memberi manfaat optimal.

Seluruh fakta maupun pertimbangan terkait usulan itu harus dipelajari secara utuh sebelum DPR mengambil sikap resmi. Pembahasan dilakukan komprehensif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. "Ini menjamin keputusan akhir dapat dipertanggungjawabkan serta tetap mengutamakan kepentingan nasional bangsa dan negara secara utuh," katanya.

Rencana penjualan itu sebelumnya diusulkan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R-33 kepada DPR. Surat itu dibacakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (18/8/2026).

Soal rencana itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjelaskan, penghapusan KRI Ki Hajar Dewantara telah diusulkan sejak 2017. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menyebut, biaya pemeliharaan kapal cukup tinggi. Sehingga secara teknis tidak lagi ekonomis bila terus diperbaiki.

"KRI Ki Hajar Dewantara adalah kapal buatan 1980-an, umurnya sudah lebih dari 40 tahun dan opsi penjualan mem-

berikan manfaat karena proses dismantling tetap menghasilkan nilai ekonomis bagi negara," terangnya.

Sebagai informasi, KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal perang berbobot 1.850 ton yang dibuat Galangan Kapal Uljanik Yugoslavia pada 1981 untuk keperluan latih dan tempur. Penamaan kapal perang itu mengambil nama pahlawan nasional Raden Mas Soewardi Soerjaningrat yang sangat sejalan dengan fungsi utama pendidikan.

Selain berperan sebagai kapal pemukul, KRI Ki Hajar Dewantara memikul tugas mendidik serta mencetak perwira TNI AL siap tempur. Di kapal ini para perwira muda lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) memulai awal pengabdian pertama mereka bagi menjaga kedaulatan maritim wilayah Indonesia.

KRI Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam operasi patroli menjaga kedaulatan laut serta pengamanan jalur pelayaran dari ancaman perompakan. Selain itu kapal perang ini terlibat berbagai aksi kemanusiaan bantuan tsunami Aceh dan Nias pada 2004 hingga 2005 lewat Operasi Gurita nasional. ■ PYB